

**PANDANGAN AKHIR
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA (PAN)
TAHUN ANGGARAN 2003**

Disampaikan oleh : **Makmur Hasanuddin**
No. Anggota : **A-257**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Yang Kami Hormati,

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Saudari Menteri Keuangan beserta jajarannya

Rekan-rekan Wartawan

Hadirin yang kami muliakan

Di pagi yang penuh berkah ini, marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Illahi Robbi, seraya membuka hati nurani agar diberikan kemampuan memberikan kontribusi dan solusi terbaik bagi negeri ini.

Pimpinan dan Para Anggota dewan serta Hadirin yang Kami hormati.

Saudara Menteri dan jajarannya yang kami muliakan.



Dalam mensikapi RUU PAN 2003 ini, Fraksi PKS menilai perlunya mencermati beberapa hal sebagai berikut:

I. Berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan BPK – RI terhadap LKPP TA 2003, BPK menemukan kelemahan sebagai berikut:

1. Adanya kelemahan sistem pengendalian intern
2. Adanya ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan
3. Pengungkapan SAL yang tidak memadai.

Kelemahan-kelemahan tersebut menyebabkan BPK RI menyatakan tidak dapat memberikan pendapat atas PAN 2003 dalam laporan hasil pemeriksaannya.

II. Sebagian dari kelemahan tersebut telah diperbaiki oleh Pemerintah, namun ada beberapa hal yang masih perlu ditindaklanjuti seperti:

1. Perhitungan SAL masih tetap terdapat selisih antara saldo fisik dan saldo menurut buku walaupun BPK telah melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas permintaan DPR.
2. Kelemahan pengendalian intern, antara lain belum dilakukannya rekonsiliasi antara SAL dan saldo kas, dan rekonsiliasi realisasi anggaran menurut Bendahara Umum negara dan menurut kementerian/lembaga
3. Ketidapatuhan terhadap perundangan-undangan, yaitu Penyusunan PAN TA 2003 dan pertanggung jawaban negara bukan pajak yang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Fraksi PKS dapat menerima RUU Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003 dengan catatan:

1. Agar *opini disclaimer* dari BPK dicantumkan sebagai catatan dalam kesimpulan.
2. Agar pemerintah terus menghitung SAL yang benar, karena akan dipertanggungjawabkan dalam perhitungan SAL awal tahun 2004.



3. Agar seluruh jajaran pemerintah pengguna anggaran melaksanakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan disiplin sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Diharapkan agar pemerintah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesimpulan hasil pemeriksaan dan saran BPK RI terhadap PAN TA 2003.

Demikian pandangan Fraksi PKS terkait dengan pembahasan PAN TA 2003. Walladzinna jahadu fiina, lanahdiyannahum subulanaa (barang siapa bersungguh-sungguh di jalan-Ku, niscaya akan Aku tunjukkan jalan keluar dari permasalahannya),
Atas perhatian dan kesabaran Bapak/Ibu mendengarkan pandangan Fraksi PKS, kami ucapkan terima kasih.

Wabillahit taufiq wal hidayah

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

Jakarta, 8 Muharam 1427 H / 07 Februari 2006

**PIMPINAN FRAKSI
PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI
No. Angg. : A-265

MUSTAFA KAMAL, SS
No. Angg. : A-248

